

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan didirikan karena memiliki tujuan utama yaitu untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Disamping itu terdapat tujuan lain yaitu berkaitan dengan kesejahteraan karyawan, kesejahteraan manajer dan pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar. Sehubungan dengan hal tersebut sering terjadi perbedaan kepentingan antara manajemen sebagai pengelola perusahaan dengan pihak pemegang saham sebagai penyandang dana. Pihak manajer akan mengambil keputusan yang dapat meningkatkan kesejahteraannya serta peningkatan fasilitas eksklusif, sedangkan pemegang saham tidak setuju mengenai hal tersebut sebab dapat meningkatkan biaya bagi perusahaan dan dapat mengurangi pendapatan pemegang saham.

Adanya perbedaan kepentingan tersebut menimbulkan pertentangan yang disebut dengan konflik keagenan. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa teori keagenan menjelaskan hubungan kontrak antara satu atau beberapa orang pemberi kerja atau principal yang mempekerjakan dan memberikan wewenang kepada orang lain atau agent untuk melaksanakan sejumlah jasa dan mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Agen merupakan pihak manajemen yang menjalankan operasi perusahaan. Sebagai pengelola perusahaan pihak manajemen lebih banyak mengetahui informasi

internal dan prospek perusahaan dibandingkan dengan pihak principal. Adanya ketidakseimbangan dalam penguasaan informasi maka dapat memunculkan terjadinya asimetri informasi.

Munculnya asimetri informasi yang terjadi antara pihak principal dan pihak manajemen tersebut dapat diminimalisir dengan suatu mekanisme *monitoring* yang bertujuan mensejajarkan perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak. Mekanisme tersebut yaitu *corporate governance*, dimana dalam hal ini *corporate governance* mencakup pengarahan dan pengendalian perusahaan dalam lingkup yang lebih luas sebab mengatur seluruh organ perusahaan. FCGI mendefinisikan *corporate governance* sebagai: "...seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu system yang mengendalikan perusahaan.

Indonesian Institute of Corporate Governance (IICG) menyatakan bahwa praktik *corporate governance* di Indonesia memang masih buruk (Kalistarini, 2010). Praktik penerapan GCG di Indonesia sebenarnya telah dimulai pada tahun 2003 tetapi hasilnya belum memuaskan. Tahun 2004 perusahaan publik yang bersedia dinilai praktik GCG-nya hanya berjumlah 22 dari 334 perusahaan atau turun sebanyak 3,3% (Swasembada, 2005 dalam Kalistarini). Kurangnya partisipasi tersebut membuat pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap praktek GCG di Indonesia. Disamping itu adanya

skandal kasus Enron memicu perusahaan untuk memberikan perhatian khusus terhadap praktek *corporate governance*. Runtuhnya perusahaan publik tersebut disebabkan adanya kegagalan strategi maupun praktek curang dari manajemen puncak yang berlangsung tanpa terdeteksi dalam waktu yang cukup lama karena lemahnya pengawasan yang independen oleh *corporate board*. Disamping itu di Indonesia sendiri kasus yang terjadi pada PT. Jamsostek tahun 2011 juga menunjukkan bahwa praktik *corporate governance* di Indonesia masih lemah. Pada kasus tersebut PT. Jamsostek tidak transparan dalam melakukan pelaporan keuangan dan menyimpang dalam praktik *corporate governance*.

Ciri utama lemahnya *corporate governance* dalam perusahaan yaitu munculnya tindakan bagi para manajer untuk mementingkan kepentingannya sendiri daripada kepentingan pemegang saham. Jika para manajer perusahaan melakukan tindakan-tindakan yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan investor, maka akan menyebabkan jatuhnya harapan para investor tentang pengembalian (*return*) atas investasi yang telah mereka tanamkan. Apabila para manajer bertindak untuk mementingkan kepentingan sendiri daripada kepentingan investor, maka akan menyebabkan jatuhnya harapan investor tentang pengembalian atas investasi yang mereka tanam.

Pihak investor sebagai penyandang dana kebutuhan modal perusahaan dan sebagai pemilik kekayaan perusahaan memiliki hak untuk melihat apakah kekayaan digunakan untuk kepentingannya. Akibat adanya pemisahan fungsi manajemen dengan pemilik maka perlu suatu perangkat dimana pemilik

mendapat jaminan seberapa jauh penyertaannya dapat memberikan hasil yang diharapkan, karena pemilik tidak dapat turut langsung dalam pengelolaan perusahaan. Oleh karena itu, kepentingan investor sebagai penyandang dana perlu dilindungi, sehingga investor atau pemegang saham akan menunjuk pihak sebagai perwakilan mereka dalam mengawasi perusahaan. Pihak tersebut yaitu dewan komisaris, yang bertugas melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan.

Peranan dewan komisaris semakin penting dalam penerapan *corporate governance*. Dewan komisaris merupakan suatu mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Dewan komisaris diharapkan mampu berfungsi dengan baik dalam perusahaan. Oleh sebab itu agar dewan komisaris berfungsi dengan baik, maka komposisi dewan komisaris harus diperhatikan. Di Indonesia menganut model *two-tier board structure* yang terdiri dari dewan komisaris dan dewan direksi. Peran dewan komisaris dan dewan direksi dipisah secara jelas. Dewan komisaris akan mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh dewan direksi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kualitas tatakelola perusahaan dapat dilihat dari efektifnya proporsi jumlah dewan komisaris yang tepat, agar pengambilan keputusan dapat berjalan tepat dan cepat. Jumlah dewan yang terlalu banyak akan berdampak pada efisiensi, namun apabila jumlah dewan terlalu sedikit akan mengganggu kinerja dewan itu sendiri. Tata kelola perusahaan semakin baik jika komposisi *board* adalah heterogen. Oleh karena

itu, maka menimbulkan pertanyaan bagaimana struktur *board* yang efektif sesuai dengan kondisi perusahaan untuk menghasilkan kinerja yang baik.

Beberapa penelitian mengaitkan ukuran dewan dengan kinerja perusahaan. (Jensen 1993; Lipton and Lorsch 1992; Yermak 1996) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki ukuran dewan direksi yang besar tidak bisa melakukan koordinasi, komunikasi dan pengambilan keputusan dengan baik dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki dewan yang kecil sehingga nilai perusahaan yang memiliki dewan yang besar lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki dewan yang lebih sedikit. Dalton et.al (1999) mengatakan bahwa adanya hubungan positif antara ukuran dewan dengan kinerja perusahaan. Sedangkan Eisenberg et.al (1998) mengatakan adanya hubungan negatif antara ukuran dewan dengan kinerja perusahaan.

Conger dkk (2001: 54) menyatakan bahwa tidak ada ukuran dewan yang dianggap tepat, hal tersebut karena adanya kompleksitas perusahaan, umur perusahaan dan kebutuhan akan board member yang berbeda pada masing-masing perusahaan. *Board size* dianggap efektif apabila sesuai dengan tipe perusahaan, ukuran perusahaan atau aset perusahaan, budaya perusahaan, budaya perusahaan dan kebutuhan akan *board* itu sendiri dalam pengelolaan perusahaan (*Council On Foundation Board Breafing 2006*). Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti mengenai determinan *board size* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009- 2012. *Board* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keseluruhan jumlah dewan komisaris

yang digunakan peneliti sebagai variabel terikat. Faktor *firm size*, *firm age*, diversifikasi segmen usaha, tobins Q, volatilitas saham dan *free cash flow* yang merupakan faktor penentu dari *board size* digunakan peneliti sebagai variabel bebas.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *firm size* memiliki pengaruh terhadap *board size*?
2. Apakah *firm age* memiliki pengaruh terhadap *bord size*?
3. Apakah diversifikasi segmen usaha memiliki pengaruh terhadap *board size*?
4. Apakah Tobin`s Q memiliki pengaruh terhadap *board size*?
5. Apakah Volatilitas saham memiliki pengaruh terhadap *board size*?
6. Apakah *free cash flow* memiliki pengaruh terhadap *board size*?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari uraian diatas maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan menguji pengaruh *firm size* terhadap *board size*.
2. Menganalisis dan menguji pengaruh *firm age* terhadap *board size*.
3. Menganalisis dan menguji pengaruh diversifikasi segmen usaha terhadap *board size*.

4. Menganalisis dan menguji pengaruh Tobins Q terhadap *board size*.
5. Menganalisis dan menguji pengaruh volatilitas saham terhadap *board size*.
6. Menganalisis dan menguji pengaruh *free cash flow* terhadap *board size*.

1.4. Manfaat penelitian

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai praktek *board governance* dan menjadi sumber referensi bagi penelitian lain yang akan melakukan penelitian sejenis.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam menentukan ukuran dewan yang efektif dan sesuai dengan karakteristik perusahaan.

3. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pemahaman tentang faktor penentu ukuran dewan.

1.5. Sistematika penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah terkait faktor- faktor yang mempengaruhi *board*, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang mendukung pembahasan yaitu pengertian *firm size*, *firm age*, diversifikasi segmen usaha, tobins Q, volatilitas saham dan *free cash flow* . Bab ini juga berisi tentang penelitian sebelumnya, hipotesis, model analisis, dan kerangka pemikiran.

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini terdiri dari pendekatan penelitian yang menitikberatkan pada pengujian hipotesis dengan menggunakan data terukur dan teknik analisis regresi linier berganda, mengidentifikasi variabel-variabel yang diteliti, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, prosedur penentuan sampel dan teknik analisis yang digunakan, yaitu regresi linier berganda.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil dan pembahasan penelitian yang terdiri dari: gambaran umum subjek penelitian, deskripsi hasil penelitian mengenai pengaruh *firm size*, *firm age*, diversifikasi segmen usaha, tobins Q, volatilitas saham dan *free cash flow* terhadap *board size*.

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan tentang simpulan dari penelitian bahwa variabel *firm size*, *firm age*, diversifikasi segmen usaha, tobins Q, volatilitas saham dan *free cash flow* berpengaruh signifikan terhadap *board size*.

